

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur disimpulkan sebagai berikut:

1) Secara Simultan :

Dari hasil analisis dan pembahasan secara simultan diketahui nilai sig = 0.000 sedangkan nilai $\alpha = 0,05$ sehingga dapat dikatakan nilai signifikannya lebih kecil dari nilai alpha sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara bersama-sama X_1 dan X_2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y .

2) Secara Parsial :

a. X_1 (PAD)

Hasil regresi menunjukkan bahwa angka signifikan untuk variabel X_1 sebesar 0,341. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikan sebesar 0,05 sehingga kaidah pengambilan keputusannya adalah menerima H_0 dan menolak H_a , artinya secara parsial X_1 tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y

b. X_2 (DAU)

Hasil regresi menunjukkan bahwa angka signifikan untuk variabel X_2 sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikan sebesar 0.05 sehingga kaidah pengambilan keputusannya adalah menolak H_0 dan

menerima H_a , artinya bahwa secara parsial X_2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y .

6.2 Saran

1. Untuk meningkatkan belanja daerah maka pemerintah daerah diharapkan agar terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah, demikian juga pemerintah daerah agar terus mengupayakan untuk bisa menarik Dana alokasi Umum Semaksimal mungkin.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian akan datang diharapkan akan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah, selain non-keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro-ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, Prakoso. 2004. *Pengaruh belanja daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum* pada Kabupaten/Kota di Tengah dan DIY.
- Ghozali, Imam, Arifin Sabeni. 1997. *Pokok-pokok akuntansi pemerintahan*. Edisi 4. Yogyakarta.
- Ghozali, Imam 2006 (Ekometrika, Teori, Konsep) Bp. Undip Semarang.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi sektor publik : akuntansi keuangan daerah*. Edisi 3. Selemba 4 : Jakarta
- Halim, Abdul Jakarta. 2002. seri *Akuntansi sektor publik : akuntansi keuangan daerah*
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2007. *Akuntansi sektor publik pendekatan penganggaran daerah dan akuntansi keuangan daerah*. Penerbit UNDIP: Semarang.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*. Penerbit Andi : Yogyakarta.
- Maimunah, Mutiara. (2006). *Flaypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di pulau Sumatra*. Simposiun Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Pratiwi, Novi. 2007. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prediksi belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia*. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.
- Puspita Sari, Noni dan Idhar Yahya. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja langsung*. Universitas Sumatra Utara.
- Syukriy, dan Halim: *Pengaruh Dana ALOkasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*, Simposium Nasional Akuntansi . Surabaya 16-17 Oktober 2003.

Saragih. 2003. *Desentralisasi fiscal dan keuangan daerah dalam otonomi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Widjaja. Haw. 2002. *Otonomi daerah dan otonom daerah*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lembaga Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

_____ Keputusan Menteri dalam Negeri No.29/2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

_____ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan.

_____ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah.

_____ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

_____ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

_____ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

_____ Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

_____ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Keuangan Negara.